

Program Kegiatan Tahun Anggaran 2026



PAGU APBD DLHK TAHUN ANGGARAN 2026

**15
PROGRAM**

**54
KEGIATAN**

**154
SUB KEGIATAN**

**PAGU TA. 2026
Rp. 65,619,862,000**

**Belanja Pegawai
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Rp. 40,097,660,000**

**Belanja Barang, Jasa
dan Modal
Rp. 25,522,202,000**

**Kegiatan Rutin (Sekretariat,
TU UPT CDK)
(Administrasi BMD, Administrasi
Kepegawaian, Administrasi Umum
Perangkat Daerah, Pemeliharaan,
Pengadaan, Penyediaan, PEP,
Keuangan)
Rp 2,847,413,000**

**Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor (Gaji Paruh
Waktu)
Rp. 2,438,000,000**

**Belanja Kegiatan Urusan
Lingkungan Hidup
Rp. 15,268,000,000**

**Belanja Kegiatan Urusan
Kehutanan
Rp. 4,968,789,000**

RINCIAN PROGRAM DALAM APBD DLHK T.A 2026

NO	PROGRAM	PAGU
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	45,383,073,000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	550,000,000
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	8,255,000,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	30,000,000
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	27,000,000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100,000,000
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25,000,000
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	6,041,000,000
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100,000,000
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	60,000,000
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80,000,000
12	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1,683,789,000
13	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1,301,000,000
14	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	954,000,000
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1,030,000,000
JUMLAH TOTAL		65,619,862,000



MATRIK PROGRAM KEGIATAN APBD DLHK

TAHUN ANGGARAN 2026

No	Nama Urusan Pemerintahan Daerah dan Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
	UNIT INDUK			
I A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	80 (Nilai)	Nilai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	78,00	Nilai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	100	Persen
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Tertib Pencatatan dan Fisik (pada Unit Induk)	100	100 Persen
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Predikat SKP Minimal Baik	95	Persen
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terkelola dengan Baik (Pada Unit Induk)	100	Persen
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Persen
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik (Pada Unit Induk)	100	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)		
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Dokumen RPPLH yang Disusun Sesuai Target yang Ditentukan		

III A	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1 PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA DI PROVINSI BANTEN YANG SESUAI BAKUMUTU 2 'Persentase Jumlah kelompok/lembaga masyarakat yang terlibat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1. 83,34 2. 14,29	1. Persen 2. Persen
10	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Persentase ketercapaian sub kegiatan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Persentase terlaksananya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. 100 persen 2. 100 persen	1. Persen 2. Persen
11	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	100	Persen
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE RTH (%)		
12	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Kenaikan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERSENTASE LIMBAH B3 YANG TERKELOLA (Persen)	12,26	Persen
13	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	18,3	Persen
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	90	Persen
14	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Presentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam satu Tahun	98,08	Persen
VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya (persen)	41,18%	Persen
15	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Peningkatan Jumlah Lembaga MHA yang dilakukan Pemberdayaan	7 Lembaga	Lembaga

VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya di bidang lingkungan hidup (persen)	0,52	Persen
16	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat / Kelompok Peduli Lingkungan	11,54	Persen
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (persen)	12,05	Persen
17	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	PERSENTASE LEMBAGA YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN HIDUP TINGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN	86,67	Persen
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa /kasus tindak pidana lingkungan hidup (persen)	76	Persen
18	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	PERSENTASE PENGADUAN YANG DI TINDAK LANJUTI	100	Persen
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	55,8	nilai
19	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	persentase penanganan sampah di TPA/TPST Regional	17,42	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
XII A	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		
20	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PPKH		
21	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen rencana pengelolaan kawasan hutan berupa KHDPK yang tersusun		
23	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1	Dokumen
25	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Presentase ketercapaian kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	17	Persen
26	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase Ketercapaian pelaku usaha kehutanan skala kecil dan menengah yang tertib melaksanakan tata usaha pengolahan hasil hutan kayu	30	persen
XIII A	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Indeks Keanekaragaman Hayati	0,002	Nilai
27	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Daerah Penyangga dan Ekosistem Esensial yang Dikelola	5,6	Persen

XIV A	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan	5,87	Persen
28	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Teregistrasi yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	31	Kelompok
XV	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS (persen)	61,77	Persen
29	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian Pengelolaan DAS Prioritas	20	Persen
CABANG DINAS KEHUTANAN LEBAK TANGERANG				
I B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,50	nilai
30	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terkelola dengan Baik (Pada Unit CDL LT)	100	Persen
31	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan BMD Terpenuhi (pada CDK LT)	100	Persen
32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik (Pada CDK LT)	100	Persen
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
XII B	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi wilayah lebak dan tangerang	2500	Ha
33	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	33,3	Persen
34	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase Industri Kayu yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	50	persen
XIII B	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan peran serta Kelompok Masyarakat dalam Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya wilayah Lebak Tangerang	50	Persen
36	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (CDLHK LT)	100	Persen
XIV B	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas KUPS di Wilayah Lebak Tangerang	10	Persen
37	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pertambahan Nilai NTE Kelompok PS wilayah CDK LT	30	Persen

	CABANG DINAS KEHUTANAN PANDEGLANG SERANG CILEGON			
I C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,50	nilai
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terkelola dengan Baik pada CDK PSC	100	Persen
39	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan BMD Terpenuhi pada CDK PSC	100	Persen
40	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terasilitasi pada CDK PSC	100	Persen
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik pada CDK PSC	100	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
XII C	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas lahan kritis yang terehabilitasi seluas 2.500 hektar per tahun di wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	2500	Ha
42	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase Rehabilitasi Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis (CDLHK-PSC)	33,33	33,33
XIII C	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Peningkatan peran serta Kelompok Masyarakat dalam Konserevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya wilayah Pandeglang Serang Cilegon	50	Persen
44	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES Wilayah Pandeglang, Serang dan Cilegon	100	Persen
45	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberikan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat (CDLHK PSC)	3	Kelompok
XIV C	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase Peningkatan Kelas KUPS di Wilayah PANDEGLANG SERANG CILEGON	20	Persen
46	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pertambahan Nilai NTE Kelompok PS CDK PSC	30	Persen

	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			
I D	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,50	nilai
47	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terkelola dengan Baik pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100	Persen
48	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan BMD Terpenuhi pada UPTD Laboratorium Lingkungan	100	Persen
49	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik pada UPTD Lab Lingkungan	100	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
III B	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan yang terakreditasi	2,94	Persen
50	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kinerja Laboratorium	40,83	Nilai
	UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan			
I E	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,50	nilai
51	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terlayani sesuai Regulasi pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	100	Persen
52	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terasilitasi pada UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	100	Persen
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik pada UPTD SPTH	100	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
XII D	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Jumlah Bibit Bersertifikat Untuk Rehabilitasi Lahan	10	Persen
53	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah bibit yang bersertifikat	100	Persen

	UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten			
I F	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61,5	nilai
54	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terkelola dengan Baik pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	100	Persen
55	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan BMD Terpenuhi pada UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten	100	Persen
56	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terfasilitasi pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100	Persen
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD Pengelolaan Tahura Banten	100	Persen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
XIII D	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Tingkat Efektifitas Pengelolaan Tahura Banten	66	nilai
55	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	100	Persen



TERIKAS
MAIH